



PIDATO PIMPINAN

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENETAPAN RANPERDA PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARA TAHUN 2023 JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2023

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ~~Bupati~~,
Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan
menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim"
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini
Jum'at, tanggal 29 September 2023, dengan Agenda
Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang
Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kami
buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna dalam
rangka penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari
2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah dihadiri
lebih dari 2/3 dari jumlah anggota DPRD, maka kourum telah
terpenuhi dan Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam rangka Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, pada Rapat Paripurna tanggal 14 September 2023 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, untuk dapat dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, berada dalam kondisi yang tidak sehat, dimana terdapat defisit yang cukup besar yang disebabkan turunnya proyeksi pendapatan dan tidak tercapainya target SILPA Tahun 2022 serta adanya kewajiban mandatory yang harus dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2023.

Dengan kondisi tersebut, pembahasan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan pembahasan yang paling sulit dan paling rumit yang pernah dilakukan.

DPRD bersama Pemerintah Daerah harus bisa menyeimbangkan kembali neraca keuangan daerah yang di proyeksikan defisit tersebut. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kebijakan yang tidak populis yang harus diambil untuk menyeimbangkan dan menyetatkan kembali keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023, seperti melakukan rasionalisasi besar-besaran kegiatan OPD, meresposisi penggunaan SILPA Tahun 2022 serta mengevaluasi kembali target-target kinerja program dan kegiatan, termasuk kondisi PAD kita.

Kondisi tersebut, kiranya juga dapat dimaklumi oleh OPD-OPD agar program, kegiatan dan keseimbangan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 dapat kita selamatkan dan kita wujudkan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023 dan diakhir pembahasan

Yaim
pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada siang hari ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD. Sebelum Badan Anggaran menyampaikan laporannya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa catatan penting dari hasil pembahasan tersebut yang perlu kita pahami bersama, sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum tertata sesuai dengan kaidah-kaidah tata pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kondisi ini dapat dilihat dari defisit murni

yang diusulkan pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 sebesar Rp. 637 M yang pada akhirnya dapat dibalanced kembali, masih banyak realisasi kegiatan OPD yang rendah sampai September 2023 serta cukup banyak terjadi perbedaan data keuangan antara OPD dengan TAPD dan antar dokumen perencanaan anggaran daerah. Kondisi ini perlu segera dibenahi, agar dapat terwujud tata keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah perlu segera menyiapkan system dan data base semua potensi pendapatan daerah yang saling terintegrasi satu sama lainnya, agar perhitungan target pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih akurat, sistimatis dan terukur. Saat ini, target-target pendapatan daerah yang disusun lebih banyak bersifat perkiraan dengan memperhatikan realisasi dan trend-trend penerimaan tahun sebelumnya dan belum mengacu kepada data base potensi dari semua penerimaan daerah.
3. Dengan kondisi Perubahan APBD Tahun 2023 yang mengalami kontraksi yang cukup besar pada pelaksanaan

program dan kegiatan, maka OPD-OPD perlu mengevaluasi dan meresposisi kembali target-target kinerja program dan kegiatan termasuk target kinerja RPJMD yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD. Demikian juga TAPD, perlu melihat kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan ditindak lanjuti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2024.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar rapat paripurna ini, untuk lebih jelasnya hasil pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, pada kesempatan ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD yang sekaligus merupakan Sekretaris Badan Anggaran kami persilahkan untuk membacakan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap

Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 tersebut?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023.

Sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan

dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB

.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD dan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 17/SB/2023 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....
Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan dan ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka acara rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur , kami persilahkan.

.....
Penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur
WASUB (Audi Joinaldi)
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir/sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa

Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Bersama, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023 yang sudah kita sepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi dan kami menyarankan pula kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membangun komunikasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri, agar kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dapat dipahami oleh Kemendagri yang tidak terevaluasi nantinya.

Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD tahun

2023 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2023 ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada sore hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD, TAPD dan OPD-OPD yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023 ini sebelum batas waktu terakhir penetapannya.

Selanjutnya, kami menyampaikan juga permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan pembahasan dan pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan
“Alhamdulillahrabbi’alimin“ Rapat Paripurna dalam rangka

**Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang
Perubahan APBD Tahun 2023, kami tutup.**

..... (ketokan palu 3 x)

***Terima kasih
Wabillahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb***